

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam Hubungan Internasional terdapat berbagai bentuk perwujudan interaksi antar-negara yang dinamis dan berkelanjutan sebagai salah satu upaya mempertahankan kerja samanya. Faktor sejarah menjadi salah satu tolak ukur adanya unsur emosional dalam hubungan suatu negara terutama jika negara tersebut pernah mengalami masa kolonialisme.<sup>1</sup> Pembangunan yang terjadi secara bertahap merupakan salah satu ciri khas negara di kawasan Asia Tenggara karena terdapat ambisi untuk mencapai perkembangan pasca-kolonialisme. Melalui hal tersebut, setiap negara berhak menentukan bagaimana cara mereka menjalankan suatu pemerintahan termasuk menentukan strategi untuk memperoleh keuntungan.

Terdapat suatu kegiatan yang bersifat saling menguntungkan kedua negara terutama dalam mencapai kemudahan interaksi sosial serta pembangunan baik dalam bidang teknologi, perekonomian, dan ilmu pengetahuan. Hakikat dari kerja sama yang dilakukan antar dua negara dan memiliki sifat universal dikenal dengan 'hubungan bilateral.' Hubungan bilateral merupakan kesepakatan antara dua negara dalam upaya mencegah konflik karena adanya benturan kepentingan serta berusaha untuk memahami keinginan satu sama lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Teuku Rezasyah, *Bom Waktu; Hubungan Indonesia dan Malaysia*, (Bandung: Humaniora, 2011), 112.

<sup>2</sup>Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 42.

Kemitraan strategis merupakan salah satu keinginan negara mewujudkan keterbukaan pada sistem pemerintahan maupun pola pikir bermasyarakat sehingga, kerja sama bilateral diharapkan dapat membantu efektivitas dari perwujudan kesejahteraan dan kepentingan umum. Adanya kesepakatan untuk bekerja sama akan membentuk pola interdependensi antar negara terkait. Contohnya seperti Indonesia dan Malaysia, selain memiliki kedekatan geografis karena sejak masa klasik 7-13 M pernah berada di kawasan *Sundaland* atau Pentas atau Benua Sunda.<sup>3</sup> Hubungan yang mengalami pasang surut terutama pasca-kemerdekaan menciptakan ketergantungan yang timbul sebagai faktor pendukung perkembangan terutama pertukaran informasi.

Jika ditelusuri lebih lanjut, hubungan timbal balik antara Indonesia dan Malaysia didukung oleh hubungan harmonis pemerintah lokal kedua wilayah. Interaksi yang mulai sekitar tahun 1400 hingga 1824 SM menunjukkan hadirnya relasi erat antara kerajaan di Nusantara seperti Melaka-Majapahit, Johor-Aceh, dan Johor-Sulawesi. Praktik perkawinan politik juga merupakan bentuk ketergantungan dalam meningkatkan sistem politik yang kondusif. Secara kultural perkembangan gurindam, zapin, nazam dan lain sebagainya merupakan hasil asimilasi kedua negara tetangga ini yang membentuk pengetahuan baru.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Mohammad Reevany Bustami Suwandono, Ali Maksum, Rita Widiastutik, *Matriks Perdamaian: Teori Berkembang Hubungan Indonesia-Malaysia* (Yogyakarta: Penerbit Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional Program Pascasarjana, 2021), 6.

<sup>4</sup> Muhammad Takari bin Jilin Syahrizal, "Kebudayaan Nasional Indonesia dan Malaysia: Gagasan, Terapan dan Bandingannya," *Setengah Abad Hubungan Malaysia-Indonesia*, eds., Mohamad Redzuan Othman, Md Sidin Ahmad Ishak, Jas Laile S. Jafaar, Adrianus Meliala dan Sri Murni (2009): 446.

Perubahan politik juga mewarnai perjalanan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Ketika periode era kepemimpinan Presiden pertama Indonesia yaitu Dr. Ir. H Soekarno, kedua negara seringkali mengalami konflik yang mencapai puncaknya ketika masa konfrontasi saat Malaysia dianggap sebagai boneka imperialisme Barat. Pergantian sistem politik pada era kepemimpinan Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto yang berlangsung sejak Maret 1966-Mei 1998 dianggap sebagai '*The Rising Star*' karena mendorong pola hubungan yang lebih terbuka. Terlepas dari konflik yang sering terjadi di era sebelumnya, kepemimpinan Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto justru menunjukkan kedekatan mendalam sebagai negara tetangga termasuk Malaysia. Pada periode tahun 1980an baik Indonesia dan Malaysia memperoleh reputasi baik mengenai perkembangan ekonomi dan industri, walaupun politik etnisitas masih melekat pada kedua negara.<sup>5</sup>

Ketika awal pergantian Presiden Soekarno menuju Presiden Soeharto tidak hanya Indonesia yang mengalami perubahan khususnya dalam sistem politik luar negeri, Malaysia yang berada di bawah pemerintahan Perdana Menteri pertama yaitu Tun Abdul Rahman juga membangun keharmonisan dengan Indonesia. Upaya membangun rasa kepercayaan (*confident building*) atas hubungan bilateral kedua negara juga terus berlanjut ketika Malaysia berada dibawah kepemimpinan Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Haji Hussein Al-Haj (September 1970-Januari 1976) sebagai Perdana Menteri menteri kedua Malaysia. Hubungan kedua negara menjadi awal dari hadirnya periode emas karena Indonesia dan Malaysia berperan sebagai

---

<sup>5</sup> Ariel Heryanto and Sumit K. Mandal, *Challenging Authoritarianism in Southeast Asia: Comparing Indonesia and Malaysia*, (New York: Routledge Curzon, 2004), 5.

arsitek pendirian Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan perjanjian Zone of Peace Freedom and Neutrality (ZOPFAN) pada tahun 1971.<sup>6</sup>

Hubungan erat antara Indonesia dan Malaysia juga tidak lepas dari konsep ‘Serumpun.’ Konsep ini menjadi ciri khas utama hubungan antara Indonesia Malaysia karena selain dari kedekatan geografis yang dimiliki adanya kesamaan antar-budaya, agama, serta adat istiadat melahirkan suatu ikatan yang terbentuk antar kedua negara tersebut.<sup>7</sup> Persamaan yang ada tentunya juga disebabkan oleh transmigrasi sesama bangsa Melayu dan pekerja imigran, sehingga pola harmonisasi antar kedua negara perlahan mulai terwujud. Tidak hanya itu, kehidupan berdampingan masyarakat kedua negara juga ditunjukkan melalui hubungan antar etnis Melayu dan Agama Islam sebagai mayoritas yang dianut oleh masyarakat memberikan kesan satu keluarga walaupun berbeda kebangsaan.

Meskipun sudah menjalin hubungan erat selama beberapa dekade, ketegangan merupakan hal yang tidak dapat dihindari setiap pihak karena terdapat perbedaan kepentingan yang terus berubah yang menyesuaikan kebutuhan masing-masing negara. Surutnya hubungan Indonesia dan Malaysia menjadi urgensi dilakukannya upaya diplomasi. Beberapa peristiwa yang mendorong upaya diplomasi meliputi sengketa Kepulauan Ambalat dan kehadiran partai komunis di Kalimantan Utara. Sengketa Ambalat pertama kali terjadi ketika Malaysia memasukkan wilayah Ambalat ke wilayahnya di tahun 1979 secara sepihak, sementara itu wilayah tersebut masih berada pada 200 mil dari garis dasar

---

<sup>6</sup> Dr. Abdul Rahman Haji Abdullah, *Penjajahan Malaysia; Cabaran dan Warisannya*, (Malaysia: Pustaka Belajar, 1997), 97.

<sup>7</sup> Joseph Chinyong Liow, *The Politics of Indonesia-Malaysia Relation: One Kin, Two Nations* (London: Roulette Curzon, 2005), 2.

Indonesia. Isu ini mendorong sentimen mengenai anti-Malaysia oleh masyarakat Indonesia karena, Malaysia dianggap lebih mengutamakan keuntungan dari sumber daya minyak bumi di wilayah tersebut.<sup>8</sup>

Isu kedua adalah perkembangan partai komunis di wilayah Kalimantan Utara yang dikenal dengan North Kalimantan Communist Party (NKCP). Partai ini didirikan pada tanggal 30 Maret 1971, lalu dibubarkan pada tanggal 17 Oktober 1990 melalui perjanjian perdamaian pada akhir tahun 1989 yang ditanda tangani oleh pemimpin partai itu sendiri yaitu Wen Ming Chyuan. NKCP didirikan sebagai usaha pergerakan bersenjata revolusioner dan mendukung Malaysia menjadi negara hegemon selanjutnya.<sup>9</sup> Surutnya hubungan Indonesia dan Malaysia khususnya mengenai pembagian wilayah dan ideologi mendorong keinginan dari kedua negara untuk melakukan upaya diplomasi agar hubungan kedua negara kembali harmonis.

Ketika suatu negara memilih jalur diplomasi untuk menyelesaikan ketegangan dan mempererat hubungan maka terdapat pemahaman bahwa, pendekatan diplomasi adalah cara efektif untuk menghindari sengketa dan menghadirkan suasana kondusif. Proses diplomasi ditandai dengan negosiasi kepentingan nasional serta mewujudkan ide yang ingin digagas. Melalui diplomasi publik juga terdapat upaya untuk meningkatkan komunikasi dan wujud dari pertukaran informasi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Mohammad Reevany Bustami Suwandono, Ali Maksum, Rita Widiastutik, *Matriks Perdamaian: Teori Berkembang Hubungan Indonesia-Malaysia* (Yogyakarta: Penerbit Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional Program Pascasarjana, 2021), 17.

<sup>9</sup> Fujio Hara, "North Kalimantan Communist Party and The People's Republic of China," *XLIII-4* (December 2005), [https://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Periodicals/De/pdf/DE43\\_4\\_4.pdf](https://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Periodicals/De/pdf/DE43_4_4.pdf) (diakses 16 Februari, 2022).

<sup>10</sup> Jay Wang, "Public Diplomacy and Global Business," *The Journal of Business Strategy*, 27 (3), (2006), <https://www.jura.fu-berlin.de/fachbereich/einrichtungen/oeffentliches->

Dalam diplomasi publik terdapat opini publik yang berguna sebagai evaluasi guna membantu efektivitas pencapaian tujuan kedua negara.<sup>11</sup> Sebagai alat dari diplomasi publik, unsur kebudayaan dalam hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia memiliki peran krusial untuk memperjuangkan kepentingan nasional kedua negara melalui media budaya serta pendidikan sehingga memudahkan unsur politik yang ada.<sup>12</sup> Hadirnya diplomasi publik antara Indonesia dan Malaysia membantu kedua negara mewujudkan kepentingan nasional seperti pertukaran informasi mengenai kebudayaan serta interaksi yang terjadi akan meminimalisir ketegangan yang berdampak pada stabilitas keamanan kedua negara.

Perkembangan media khususnya radio dan televisi menjadi salah satu faktor pendukung hubungan Indonesia dan Malaysia melalui diplomasi publik. Pada tahun 1980an Malaysia sedang melakukan banyak pembangunan domestik seperti politik, industri, ekonomi, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Indonesia yang berada di bawah periode kepemimpinan Presiden Soeharto juga melakukan pembangunan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), salah satunya dalam bidang teknologi informasi melalui satelit dalam perkembangan siaran radio menjadi televisi. Kerja sama bilateral menggunakan media teknologi dan informasi terjadi antara Indonesia dan Malaysia melalui stasiun Radio Televisyen Indonesia (RTM) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).<sup>13</sup>

---

recht/lehrende/bolewski/dokumente/4\_\_Governance\_and\_sovereignty/Wang\_public\_diplomacy\_and\_global\_business.pdf (diakses 16 Februari, 2022): 49-58.

<sup>11</sup> E. H. Carr, *The Twenty Years Crisis 1919-1939; An Introduction to the Study of International Relations* (London: Macmillan Basingstoke, 1983), 132 dan 134.

<sup>12</sup> Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan Konsep Relevansi Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), 3.

<sup>13</sup> Sutaryo, Wihana Kirana Jaya, Sri Edi Swasono, Revrison Baswir, Irfan Dwidya Prijambada, *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila* (Yogyakarta, Tim Pusat Studi Pancasila UGM, 2021), 99, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar,

Stasiun televisi memberikan gambaran nyata mengenai kebudayaan Melayu Indonesia dan Malaysia melalui program 'Titian Muhibah.' Acara ini adalah program kebudayaan di televisi Indonesia dan Malaysia yang sama-sama menayangkan berbagai kebudayaan kedua negara. Contoh kegiatan budaya yang ditampilkan di dalam acara tersebut adalah melalui beberapa kegiatan seperti menyanyi, menari, dan bertukar pantun. Titian Muhibah merupakan salah satu bentuk nyata bagaimana Indonesia dan Malaysia berupaya untuk saling berinteraksi menggunakan media, bahkan program televisi tersebut berhasil menjadi salah satu acara televisi yang populer di saat bulan suci Ramadhan.

Program kebudayaan ini berlangsung sejak tahun 1985-1998, ide tersebut berawal dari kedatangan menteri penerangan Malaysia yaitu Tan Sri Mohamed bin Rahmat atau Datuk Rahmat ke Jakarta yang mana mengusulkan untuk memperkenalkan budaya kedua negara dengan gambaran nyata. Namun, program kebudayaan ini hilang dari layar kaca publik seiring runtuhnya pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia pada tahun 1998.<sup>14</sup> Hal ini juga menjadi latar belakang penelitian yang menganalisis kerja sama antara Indonesia dan Malaysia melalui diplomasi publik dari tahun 1985-1998 karena pada rentang waktu ini kedua negara berada dipuncak keharmonisan dan banyak bentuk kerja sama yang dilakukan untuk meminimalisir ketegangan.

---

Terdepan, dan Tertinggal

[https://books.google.co.id/books?id=N8CICwAAQBAJ&pg=PA99&lpg=PA99&dq=RTM+MALAYSIA+TITIAN+MUHIBAH&source=bl&ots=tG0PGjVS6v&sig=ACfU3U1czMUehFppr8BDmC3vGQU5E6fL3A&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj0qcyrw\\_z1AhVZ6XMBHbnJBgoQ6AF6BAgrEAM#v=onepage&q=RTM%20MALAYSIA%20TITIAN%20MUHIBAH&f=false](https://books.google.co.id/books?id=N8CICwAAQBAJ&pg=PA99&lpg=PA99&dq=RTM+MALAYSIA+TITIAN+MUHIBAH&source=bl&ots=tG0PGjVS6v&sig=ACfU3U1czMUehFppr8BDmC3vGQU5E6fL3A&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj0qcyrw_z1AhVZ6XMBHbnJBgoQ6AF6BAgrEAM#v=onepage&q=RTM%20MALAYSIA%20TITIAN%20MUHIBAH&f=false) (diakses 18 Februari, 2021), 99.

<sup>14</sup> Harmoko, "Budaya Lokal di Televisi", *Jurnal Media Indonesia*, <http://www.jurnalmediaindonesia.com/2017/03/budaya-lokal-di-televsi.html?m=> (diakses 09 Agustus, 2022).

Upaya mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia melalui diplomasi publik pada program Titian Muhibah memberikan dampak yang nyata terhadap kedua negara. Melalui media terdapat pengetahuan baru yang diperoleh ruang publik mengenai kebudayaan Melayu Indonesia dan Malaysia. Tidak hanya itu, pendekatan kebudayaan tersebut juga dapat menghindari ketegangan maupun konflik yang mungkin bisa terjadi antara sesama negara bertetangga karena terdapat rasa ketertarikan khususnya terhadap budaya Melayu itu sendiri. Maka, penelitian ini mengambil judul “Diplomasi Publik antara Indonesia dan Malaysia Pada Tahun 1985-1998: Menelaah Program Titian Muhibah.” Untuk menganalisis lebih lanjut topik ini, penulis akan menggali tentang konsep interdependensi, politik luar negeri, kerja sama bilateral, dan diplomasi publik jalur 9 dengan menggunakan teori neoliberalisme sebagai landasan utama.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Negara memiliki berbagai macam usaha untuk membangun kerja sama dengan negara lain, baik secara bilateral dan multilateral guna mendorong kemudahan interaksi sosial masyarakatnya. Kerja sama pada dasarnya memang didasari oleh unsur politik, namun beberapa kesamaan yang dimiliki dengan negara yang dituju sebagai mitra kerja sama justru menjadi keterkaitan tersendiri karena rasa solidaritas yang ada. Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga yang sepakat untuk menjalin kerja sama bilateral melalui diplomasi publik terutama dalam bidang kebudayaan untuk memperkaya pengetahuan antar negara dan

menjalin hubungan yang kooperatif. Maka dari itu, penulis akan mengajukan dua pertanyaan penelitian yaitu:

1. Mengapa Indonesia dan Malaysia menggunakan program Titian Muhibah sebagai cara diplomasi publik bilateral?
2. Bagaimana pengaruh Program Titian Muhibah dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia khususnya mengenai alasan kedua negara memilih diplomasi publik sebagai upaya mempererat hubungan pada tahun 1985-1998.
2. Mengevaluasi bagaimana pengaruh dari program Titian Muhibah sebagai salah satu proses kedua negara mempererat hubungan bilateral.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Memberikan gambaran mengenai dinamika kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia di tahun 1985-1998 yang mengalami periode emas yang mana hal tersebut menunjukkan hubungan kompleks sebagai negara tetangga.
2. Memahami bagaimana respons dari masyarakat kedua negara, serta pengaruh dari program Titian Muhibah yang menunjukkan kesamaan kebudayaan kedua negara khususnya pada budaya Melayu sebagai upaya mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia.

## 1.5 Sistematika Penelitian

Terdapat lima bagian pada sistematika penulisan dalam penelitian ini, berikut bagian-bagian tersebut:

**BAB I** : Bagian ini akan menjelaskan latar belakang serta ruang lingkup penelitian yang mana menguraikan mengenai definisi kerja sama bilateral secara umum, perkembangan hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia, pasang surut hubungan bilateral yang menjadi urgensi kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral, dan signifikansi dari diplomasi publik antara Indonesia dan Malaysia melalui penggambaran singkat mengenai program Titian Muhibah.

**BAB II** : Bagian ini menyajikan tinjauan mengenai sudut pandang dari berbagai literatur dan berbagai sumber pustaka yang ada. Tinjauan pustaka memberi pemahaman dan cara pandang para ahli yang dapat digunakan sebagai materi pengetahuan dalam topik penelitian. Pada bagian ini terdapat tinjauan mengenai teori dan konsep yang akan digunakan oleh untuk menganalisis penelitian. Selain itu, melalui bab kerangka berpikir juga membantu penulis untuk memaparkan formulasi argumen dalam penelitian dengan cara memahami beberapa ide yang memiliki hubungan dengan diplomasi publik khususnya antara Indonesia dan Malaysia.

**BAB III** : Bagian ini menjelaskan metodologi dan pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data. Metodologi penelitian menyajikan beberapa hal seperti pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik

analisis data. Uraian dalam metode penelitian akan memberikan pemahaman dalam kajian dan penyajian analisis penelitian.

**BAB IV** : Bagian ini akan menjawab dan membahas mengenai rumusan masalah yang sebelumnya sudah diajukan dengan cara menyajikan uraian analisis penelitian berdasarkan teori serta konsep dalam hubungan internasional yaitu neoliberalisme yang sudah dipilih pada bagian sebelumnya. Penulis akan mengulas mengapa Indonesia dan Malaysia menggunakan pendekatan diplomasi publik melalui program Titian Muhibah sebagai upaya mempererat hubungan bilateral dan mengevaluasi pengaruh dari program Titian Muhibah terhadap proses mempererat hubungan bilateral.

**BAB V** : Bagian terakhir pada penelitian akan memberikan kesimpulan dari penulis mengenai topik penelitian yang telah dibahas. Penulis akan menyimpulkan bagaimana diplomasi publik melalui Titian Muhibah mempererat hubungan bilateral kedua negara berdasarkan pembahasan yang telah dikaji dalam penelitian.

Demikianlah pembahasan dalam bab ini yang menjelaskan latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian dari topik yang berjudul “Diplomasi Publik Antara Indonesia dan Malaysia Pada Tahun 1985-1998: Menelaah Program Titian Muhibah.” Pada bagian selanjutnya penulis akan membahas mengenai penelitian yang sudah dilakukan para ahli dalam bentuk tinjauan pustaka, yang mana sumber kajian literatur akan membantu peneliti melihat sudut pandang para peneliti sebelumnya.